



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 22 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1996 / 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

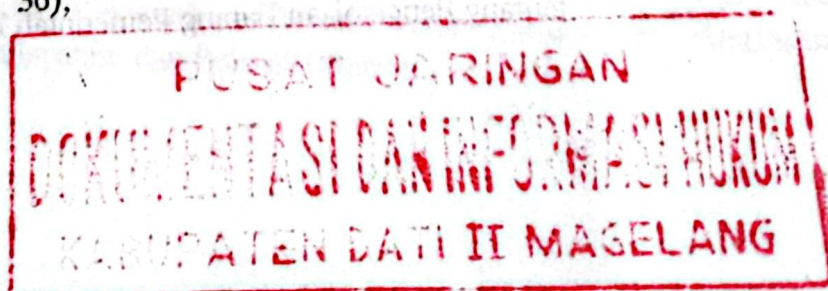
Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1996/1997 tertanggal 4 Agustus 1997 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

AN HUKUM
ETARIAT DAERAH
ELANG

98

C1



2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975)
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Meteriil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 tanggal 24 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor : 903/517/1996 tanggal 21 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1996/1997 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/64/1997 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggran 1996 / 1997 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1996 tanggal 28 Nopember 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1996/1997 ;

27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/ 1997 ;

2. Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/344/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat - rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 1997 ;

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 6 September 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran 1996 / 1997 yaitu sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp.34.740.004.552,00 |
| 2. | Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. | Rutin..... | Rp. 14.807.795.563,00 |
| b. | Pembangunan..... | <u>Rp. 17.184.111.655,00</u> |
| | | Rp.31.991.907.218,00 |
| 2. | Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah..... | <u>Rp. 2.748.097.334,00</u> |

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997 yaitu sebagai berikut Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| a. | Pendapatan : | |
| | Pendapatan..... | Rp. 2.491.927.158,00 |
| b. | Belanja : | |
| - | Rutin..... | Rp. 2.303.986.887,00 |
| - | Pemabangunan ... | Rp. - |
| | | <u>Rp. 2.303.986.887,00</u> |
| c. | Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah | Rp. 187.940.271,00 |

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 Pasal 2 diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 6 September 1997

DPRD
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD
H. AKHMAD SOBOERI

TTD
K A R D I

RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. DATI II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

PENERIMAAN

PENGELUARAN

No.	URAIAN PENERIMAAN..	PERUBAHAN APBD 1996/1997	REALISASI	BERLEBIH (BERKURANG)	%	No.	URAIAN BELANJA	PERUBAHAN APBD 1996/1997	REALISASI	BERLEBIH (BERKURANG)	%
A.	SISA LEDIH PERHIT. APDD TAHUN YG. LALU.	2,527,724,000	2,527,724,112	112	0.00	A.	RUTIN.	15,992,407,000	14,807,795,563	(1,184,611,437)	(7.41)
B.	PENDAPT. ASLI DAERAH.	5,749,269,000	5,952,919,862	203,650,862	3.54	1.	Belanja pegawai.	7,680,827,000	7,254,459,152	(426,367,848)	(5.55)
1.	Pajak Daerah :	1,580,400,000	1,714,164,346	133,764,346	8.46	2.	Belanja barang.	3,287,936,000	3,197,561,128	(90,394,872)	(2.75)
- Retribusi Daerah.	2,450,051,000	2,443,981,587	(6,069,413)	(0.21)	3.	Belanja pemeliharaan.	704,955,000	681,818,127	(23,116,673)	(3.28)	
- Dagang Laba B.U.M.D.	580,336,000	600,167,262	19,831,262	3.42	4.	Belanja perjalanan.	330,681,000	324,950,980	(5,730,020)	(1.73)	
4.	Penerimaan Dinas-Dinas.	55,418,000	75,301,700	19,883,700	35.88	5.	Belanja lain-lain.	2,391,085,000	2,390,961,851	(123,149)	(0.01)
5.	Penerimaan Lain-lain.	683,064,000	719,304,967	36,240,967	5.31	6.	Anggaran pinjaman/mutang dari luar.	261,389,000	260,416,705	(972,295)	(0.37)
C.	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK.	3,709,153,000	4,976,214,543	1,267,061,543	34.16	7.	Belanja pensiun.	0	0	0	0.00
1.	Bagi Hasil Pajak.	3,034,224,000	4,434,748,282	1,400,524,282	46.16	8.	Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan.	1,102,208,000	471,551,920	(630,656,080)	(57.22)
- PDB Dati II.	1,497,347,000	2,399,966,321	1,102,419,321	73.62	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk tagihan lain.	224,278,000	221,555,500	(2,722,500)	(1.20)	
- PDB Dag. Pem. Pusat.	483,740,000	530,901,961	47,161,961	9.75	10.	Pengeluaran yang tidak terangkai.	9,128,000	4,700,000	(4,428,000)	(47.94)	
- PKD - DDNDK.	1,052,937,000	1,303,880,000	250,943,000	23.83							
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak.	674,929,000	541,466,261	(133,462,739)	(19.77)						
- Sumb. Diversifikasi Cengk. Hutan Hasil Hutan.	0	37,000,000	37,000,000	ERR							
- S.W.R.P.J.	16,500,000	18,550,834	2,050,834	12.43							
- Pemberian Hak Atas Tanah.	22,023,000	20,473,250	(1,549,750)	(7.04)							
- Bahan Galian Gol. C.	5,500,000	10,943,822	5,443,822	98.98							
- Air Bawah Tanah.	492,440,000	312,044,535	(180,395,465)	(36.63)							
- Ketr. Kulit/Ternak/Ternak Sewa Tanah.	102,318,000	97,662,346	(4,655,654)	(4.55)							
- Wajib Laporan Kesej. Buruh.	30,952,000	42,953,952	12,001,952	38.78							
- Air Perumahan Tanah.	4,514,000	967,256	(3,546,744)	(78.57)							
	578,000	648,400	70,400	12.18							
	104,000	221,866	117,866	113.33							
D.	SUMB. DAN BANTUAN.	20,835,845,000	20,451,284,522	(384,560,478)	(1.85)	B.	PEMBANGUNAN.	17,573,966,000	17,179,184,636	(394,781,314)	(2.25)
1.	Sumbangan.	8,721,811,000	8,555,323,092	(166,487,908)	(1.90)	1.	Industri.	13,000,000	13,000,000	0	0.00
- Sumb. SDA.	436,300,000	436,300,000	0	0.00	2.	Pertanian & Kehutanan.	244,031,000	242,102,903	(1,928,097)	(0.79)	
- Subsidi/Terim. Keuangan SDPP-SDN.	6,264,478,000	6,548,040,092	(416,457,908)	(5.98)	3.	Sumber Daya Air & Irigasi.	170,000,000	168,644,500	(1,355,500)	(0.80)	
- SDBO-RSUD.	546,318,000	546,318,000	0	0.00	4.	Tenaga Kerja.	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
- SPT-GUL.	105,093,000	105,093,000	0	0.00	5.	Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.	670,496,000	669,176,725	(1,319,275)	(0.20)	
- Bant. kpd. Desa/Kelurahan (dari penyis. PDB, Pajak & Retrib. Sumb. Dati II kpd. Dinas P & K.	562,832,000	612,802,000	49,970,000	8.88	6.	Transportasi.	5,420,903,000	5,407,053,212	(13,850,788)	(0.26)	
	56,570,000	56,570,000	0	0.00	7.	Pertambangan & Energi.	9,400,000	9,400,000	0	0.00	
2.	Bantuan (INPRES).	11,119,892,000	11,101,819,630	(18,072,370)	(0.16)	8.	Pariwisata & Telekom. Daerah.	28,250,000	28,249,000	(1,000)	(0.00)
a.	Inpres Dati II.	9,877,858,000	9,865,802,568	(12,055,432)	(0.12)	9.	Pembang. Daerah & Pemukiman Kembali.	2,483,141,000	2,467,327,830	(15,813,170)	(0.64)
- Dati II.	5,719,643,000	5,715,267,300	(4,375,700)	(0.08)	10.	Lingk. Hidup & Tata Ruang.	564,752,000	564,576,500	(175,500)	(0.03)	
- PLP & Perkotaan.	0	0	0	0.00	11.	Pend. Keady. Nas. & Keperd. d. Tuhan YME, Pemuda & OR.	2,095,438,000	2,094,414,000	(1,024,000)	(0.05)	
- Penghijauan/Reboisasi.	427,153,000	427,153,000	0	0.00	12.	Kependudukan & Kel. Sejahtera.	227,750,000	193,314,453	(32,435,547)	(14.24)	
- Rehabilitasi SDA/MS.	898,731,000	898,731,000	0	0.00	13.	Kesehatan, Kesej. Sosial, Pemuda Wanita, Anak & Remaja.	542,671,000	536,837,462	(5,833,538)	(1.07)	
- Rehabilitasi Puskesmas.	92,846,000	92,846,000	0	0.00	14.	Perumahan dan Pemukiman.	376,200,000	375,468,135	(731,865)	(0.19)	
- Perencanaan/Pengawasan.	25,000,000	25,000,000	0	0.00	15.	Agama.	224,689,000	224,444,000	(245,000)	(0.11)	
- Peningkatan Jalan Kab.	1,004,400,000	1,003,286,176	(1,113,824)	(0.11)	16.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	113,000,000	112,850,000	(150,000)	(0.13)	
- Bantuan Luar Negeri.	1,549,985,000	1,545,151,092	(4,833,908)	(0.31)	17.	Hukum.	40,000,000	39,994,000	(6,000)	(0.02)	
- Bantuan Kecamatan.	42,000,000	42,000,000	0	0.00	18.	Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	4,125,525,000	3,806,354,016	(319,170,984)	(7.74)	
- Biaya opas. Peny. Pertanian.	118,100,000	116,368,000	(1,732,000)	(1.47)	19.	Politik, Pemerintahan, Komunikasi dan Media Masa.	105,743,000	105,008,950	(734,050)	(0.70)	
- Pembinaan Masyarakat Tertinggal.	0	0	0	0.00	20.	Kemampuan & Keterampilan Umum.	66,470,000	66,470,000	0	0.00	
- Pengendalian Dampak Lingk.	0	0	0	0.00	0A.	Bantuan Pembangunan Daerah Bawahau.	50,000,000	50,000,000	0	0.00	
b.	Sarana Pendidikan SD.	1,067,552,000	1,066,832,000	(720,000)	(0.07)						
c.	Sarana Kesehatan.	174,482,000	169,185,062	(5,296,938)	(3.04)						
3.	Bantuan dari Dati I. (2POA).	994,142,000	994,141,800	(200)	(0.00)						
E.	PENDAP. PEMBANGUNAN.	744,382,000	826,934,544	82,552,544	11.09						
a.	Pinjaman Pemda.	744,382,000	826,934,544	82,552,544	11.09						
- ADB.	744,382,000	826,934,544	82,552,544	11.09							
- Dank Pasar Kab. Magelang.	0	0	0	0.00							
b.	Pinjaman DUMD.	0	0	0	0.00						
F.	JUMLAH A. S.D.E.	33,566,373,000	34,735,077,583	1,168,704,583	3.48		RUTIN DAN PEMBANG.	33,566,373,000	31,938,980,249	(1,577,392,751)	(4.71)
	URUSAN KAS & PERHIT.	2,914,860,000	2,491,927,158	(422,932,842)	(14.51)	C.	URUSAN KAS DAN PERHIT.	2,914,860,000	2,303,986,887	(610,873,113)	(20.96)
	JUMLAH SELURUHNYA	36,481,233,000	37,227,004,741	745,771,741	2.04		JUMLAH SELURUHNYA	36,481,233,000	34,242,967,136	(2,190,265,864)	(6.00)

30 JULI 1997